



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	8 (<i>delapan</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI
Hari, Tanggal	:	Senin, 31 Mei 2021
Pukul	:	16.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohomad Hekal, M.B.A. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022
Hadir	:	1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri Perdagangan RI, Muhammad Irfan Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan RI pada pukul 17.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 31 Mei 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor No. AG/03981/DPR RI/ III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Perihal Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Tahun 2022).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kementerian Perdagangan RI terkait realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 28 Mei 2021 sebesar Rp618.698.776.225 (*enam ratus delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) atau 21,06% dari total pagu Rp2.937.385.806.000 (*dua triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam ribu rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI terkait dengan pemblokiran anggaran sebesar Rp307,49 Miliar untuk pembiayaan kegiatan Kementerian Perdagangan RI TA 2021 antara lain:
 - a. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebesar Rp164,45 miliar;
 - b. Pembangunan Pusat Produk Dalam Negeri Unggulan Daerah di Makasar sebesar Rp30 miliar
 - c. Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner di 10 Kawasan Wisata sebesar Rp 44 miliar
 - d. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non SRG sebesar Rp 16,5 miliar;
 - e. Kegiatan lainnya (pengadaan kendaraan operasional, pengadaan peralatan perkantoran, pembangunan lanjutan gedung Standarisasi dan Pengendalian Mutu, dll) sebesar Rp 52,54 miliar.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan nomor B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L T.A 2022, sebesar Rp2.392.277.527.000 (*dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan RI TA 2022 sebesar Rp288.738.240.000 (*dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) untuk membiayai beberapa program/kegiatan antara lain:
 - a. Pemenuhan Belanja operasional KDEI sebesar Rp8.070.780.000 (*delapan miliar tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*)
 - b. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar rupiah*);
 - c. Pengawasan kegiatan Kemendag, Pengawasan Perbaikan Tata Kelola di Lingkungan Kemendag, dan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perdagangan sebesar Rp19.424.230.000 (*sembilan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - d. Pelaksanaan Presidensi G20, persiapan ketuanrumahan ASEAN 2023, ketuanrumahan dalam ICCO dan ITRC, pelaksanaan FTA center di pusat dan daerah, dan beberapa perundingan lain yang belum teranggarkan sebesar Rp69.369.860.000 (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - e. Kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran dan perkuliahan, diantaranya: pengadaan meubelair gedung kelas B dan C, pengadaan alat laboratorium dan pembangunan lanjutan gedung kampus Akademi Metrologi (AKMET) sebesar Rp90.572.370.000 (*sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

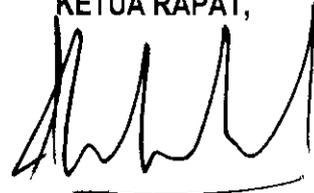
- f. Penyelenggaraan jalur *inpassing* dan peralatan laboratorium Pengujian Mutu Barang sebesar Rp1.500.000.000 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
 - g. Pengembangan ruang lingkup pelayanan kalibrasi, pengembangan ruang lingkup layanan pengujian mutu barang, instalasi pengujian UTTP dan pengelolaan SUML, edukasi konsumen, pelaksanaan pengawasan post border dan pengawasan kegiatan perdagangan sebesar Rp32.901.000.000 (*tiga puluh dua miliar sembilan ratus satu juta rupiah*);
 - h. Penyelenggaraan Sail Tidore yang semula dilaksanakan Tahun 2021 menjadi Tahun 2022 sebesar Rp20.000.000.000 (*dua puluh miliar rupiah*);
 - i. Pengadaan dan Pemasangan *Chiller* Gedung I dan Gedung II, Lift Gedung Jalan Jambu, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kemendag sebesar Rp36.900.000.000 (*tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.47 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

KETUA RAPAT,



MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

A-103